

TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU UMKM DI KOTA MATARAM DALAM IMPLEMENTASI SAK EMKM

LEVEL OF UNDERSTANDING AND READINESS OF MSME ACTORS IN MATARAM CITY IN THE IMPLEMENTATION OF SAK EMKM

Oleh:

Shinta Eka Kartika¹
Diah Ayu Puspaningrum²
Widowati³

¹²³Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Email:

shintaekakartika@gmail.com
diahayupuspaningrum27@gmail.com
widowati_74@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Mataram dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam pelaporan keuangannya. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Sampel penelitian berjumlah 100 pelaku UMKM di Kota Mataram dengan teknik sampling dengan aksidental. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya berada pada kategori cukup paham. Artinya pelaku UMKM di Kota Mataram memiliki pemahaman yang cukup dalam hal pengukuran, asumsi dasar dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan tingkat kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya berada pada kategori tidak siap. Pelaku UMKM di Kota Mataram tidak memiliki catatan transaksi berbasis akrual, tidak ada pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, dan tidak memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi.

Kata Kunci : *Tingkat Pemahaman, Kesiapan, SAK EMKM*

Abstract: *This study aims to analyze the level of understanding and readiness of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Mataram City in implementing Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) in their financial reporting. Data collection techniques through distributing questionnaires and documentation. These samples included 100 MSMEs in Mataram with the accidental sampling technique. Data were analyzed using descriptive analysis. The results of the study provide evidence that the level of understanding of MSMEs in Mataram in implementing SAK EMKM in its financial reporting in the category quite understand. This means that MSMEs in Mataram have sufficient understanding in terms of measurement, basic assumptions and presentation of financial statements. While the level of preparedness of MSMEs in Mataram in implementing SAK EMKM in its financial reporting in the category is not ready. MSMEs in Mataram has no records accrual-based transactions, there is no separation between the finance company with personal finance, and does not have a human resources expert in the field of accounting.*

Keywords: *Level of Understanding, Readiness, SAK EMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan (DSAK IAI, 2016). Pada tahun 2019 berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana disampaikan oleh Hj. Niken Saptarini selaku Ketua *International Council for Small Business* (ICSB) bahwa UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional sebesar 60,34 persen, menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen, dan berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 14,17 persen serta mencatat nilai investasi sebesar 58,18 persen. Melihat peran strategis UMKM dalam menjaga perekonomian masyarakat dan daerah terutama di masa pandemi. UMKM dapat menjadi andalan pemerintah saat pandemi Covid-19 ini (<https://www.kataknews.com/>).

Dukungan semua pihak dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri dan modern, serta memiliki akses pendanaan yang semakin luas dari sektor perbankan. Dari pihak perbankan, bentuk dukungan dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan kredit UMKM yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Semenjak berlakunya peraturan tersebut, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan rasio pemberian kredit oleh Bank Umum kepada UMKM. Pada tahun 2015, rasio kredit UMKM paling rendah 5% dari total kredit yang disalurkan. Selanjutnya, kewajiban tersebut semakin meningkat menjadi minimal 10% pada tahun 2016, minimal 15% pada tahun 2017, dan minimal 20% pada tahun 2018.

Dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif per 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM ini sebagai bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM (DSAK IAI, 2016).

Walaupun SAK EMKM dinyatakan lebih sederhana namun tidak mudah bagi UMKM untuk menerapkannya. Seperti halnya pada UMKM di Kota Mataram, berdasarkan survei awal yang dilakukan, beberapa UMKM mengungkapkan bahwa tidak ada pemisahan keuangan pribadi dengan usaha, pencatatan yang dilakukan baik itu atas pendapatan maupun beban diakui ketika kas diterima atau dikeluarkan. Pelaku UMKM juga mengatakan bahwa laporan keuangan tidak dibuat karena tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menyusunnya. Jika menggunakan konsultan maka asumsi pelaku UMKM lebih banyak biaya yang dikeluarkan.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman UMKM ini tentunya patut disikapi oleh pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Dalam Laporan Tahunan Bidang Pembinaan UKM tahun 2018, perkembangan jumlah UMKM di Kota Mataram tahun 2015 sebanyak 57.948, tahun 2016 menjadi 58.026, tahun 2017 menjadi 58.139 dan tahun 2018 menjadi 58.146. Namun jumlah UMKM yang dibina Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB pada tahun 2015 sebanyak 110 UMKM, tahun 2016 sebanyak 69 UMKM, tahun 2017 sebanyak 107 UMKM, dan tahun 2018 hanya 10 UMKM.

Penelitian terkait pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan telah banyak diteliti. Pemahaman terhadap SAK EMKM merupakan sejauhmana pelaku UMKM memahami SAK EMKM yang meliputi pengukuran (biaya historis), asumsi dasar (dasar akrual, kelangsungan usahan, dan

konsep entitas bisnis), dan penyajian laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) (Salmiah dkk, 2018). Hasil penelitian Salmiah dkk (2018)

menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap SAK EMKM pada Pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru hanya pada tingkat cukup. Berbeda dengan hasil penelitian Dewi & Sari (2019) bahwa pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng hampir seluruhnya mengetahui tentang SAK EMKM yang diterbitkan pada 1 Januari 2018.

Tingkat kesiapan terhadap implementasi SAK EMKM merupakan sejauh mana pelaku UMKM sudah bersedia untuk menerapkan SAK EMKM. Hasil penelitian Qimiyatussa'adah dkk (2018) menunjukkan bahwa 90% responden belum mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Putra (2018) juga menemukan mayoritas (80,4 persen) UMKM di Kota Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Lestari (2019) menemukan bahwa UMKM pengrajin mebel di Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno belum siap menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangan. Sholikin & Setiawan (2018) juga menyimpulkan bahwa Rumah Mode Een Productions dan Kanaya Konveksi tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

Berdasarkan fenomena tentang UMKM di Kota Mataram dan adanya perbedaan hasil penelitian, maka penulis termotivasi untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Lingkup, Konsep dan Prinsip Pervasif Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah, yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (DSAK IAI, 2016).

Menurut DSAK IAI (2016), informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal (DSAK IAI, 2016).

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dengan kriteria manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas, dan pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan sedangkan biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar

jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal (DSAK IAI, 2016).

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut. Pada saat menyusun laporan keuangan manajemen membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha. Selanjutnya entitas juga menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut maupun dari transaksi entitas lainnya (DSAK IAI, 2016).

Penyajian Laporan Keuangan

Menurut DSAK IAI (2016) penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

1. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat: informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan termasuk informasi komparatifnya. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten kecuali telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian. Laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan (DSAK IAI, 2016).

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi entitas mencakup pos pendapatan, beban keuangan dan beban pajak. Entitas menyajikan pos dan bagian dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode.

3. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Tingkat Pemahaman SAK EMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. SAK EMKM merupakan suatu standar akuntansi yang dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. Dengan demikian tingkat pemahaman terhadap SAK EMKM merupakan sejauh mana pelaku UMKM memahami penerapan dari SAK EMKM dalam hal pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan.

Pelaku UMKM dapat dikatakan paham jika dalam hal pengukuran unsur laporan keuangan berdasarkan pada biaya historis, seperti biaya historis suatu aset sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan sedangkan biaya historis suatu liabilitas sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal (DSAK, 2016). Pelaku UMKM dapat dikatakan paham jika dalam menyusun laporan keuangan menggunakan asumsi dasar akrual, kelangsungan usaha dan konsep entitas bisnis. Pelaku UMKM dapat dikatakan paham jika menyajikan laporan keuangan secara wajar minimal terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Tingkat Kesiapan Implementasi SAK EMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) siap didefinisikan sebagai sudah bersedia untuk. Tingkat kesiapan implementasi SAK EMKM merupakan sejauh mana pelaku UMKM sudah bersedia untuk menerapkan SAK EMKM. Dewi dan Sari (2019) mendefinisikan kesiapan sebagai suatu keadaan seseorang yang membuatnya siap untuk mengimplementasikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang dinilai dari persepsi dan faktor pendukung mengenai SAK EMKM. Persepsi mengenai SAK EMKM yang dimaksud yaitu persepsi tentang pentingnya Standar Akuntansi, pencatatan transaksi, menyimpan bukti transaksi, kontrol terhadap jalannya usaha, pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, membutuhkan seseorang yang ahli dalam akuntansi, serta akan melakukan pencatatan berdasarkan SAK EMKM.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM didefinisikan berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang sedangkan usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Bank Dunia menetapkan pembagian UMKM menjadi tiga jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya. Usaha mikro memiliki kriteria: a). Jumlah karyawan kurang dari 10 orang, b). Pendapatan setahun tidak melebihi \$100 ribu, c). Jumlah aset tidak melebihi \$100 ribu. Usaha kecil memiliki kriteria: a). Jumlah karyawan kurang dari 30 orang, b). Pendapatan dalam setahun kurang dari US \$3 juta dan c). Kepemilikan aset kurang dari US \$3 juta. Usaha menengah memiliki kriteria: a). Jumlah karyawan maksimal 300 orang, b). Pendapatan setahun US\$15 juta dan c). Kepemilikan aset mencapai US \$15 juta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan terkait tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Mataram yang berjumlah 58.146 dimana jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan sampling aksidental. Dalam teknik sampling aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data jawaban responden atas kuesioner yang telah di isi. Sumber data diperoleh dari sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan penyebaran kuesioner pada pelaku UMKM di Kota Mataram.

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah:

- 1) Tingkat pemahaman terhadap SAK EMKM merupakan sejauh mana pelaku UMKM memahami penerapan dari SAK EMKM dalam hal pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan. Indikator tingkat pemahaman terhadap SAK EMKM diadopsi dari penelitian Salmiah dkk (2018) dengan menggunakan skala likert 5 poin. Pelaku UMKM dapat dikatakan paham jika dalam hal pengukuran unsur laporan keuangan berdasarkan pada biaya historis. Pelaku UMKM dapat dikatakan paham jika dalam menyusun laporan keuangan menggunakan asumsi dasar akrual, kelangsungan usaha dan konsep entitas bisnis. Pelaku UMKM dapat dikatakan paham jika menyajikan laporan keuangan secara wajar minimal terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.
- 2) Tingkat kesiapan terhadap implementasi SAK EMKM merupakan sejauh mana pelaku UMKM sudah bersedia untuk menerapkan SAK EMKM. Indikator tingkat kesiapan terhadap implementasi SAK EMKM diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Dewi dan Sari (2019) dengan menggunakan skala Guttman. Tingkat kesiapan terhadap implementasi SAK EMKM diukur dengan persepsi pelaku UMKM dan adanya fasilitas pendukung meliputi pentingnya SAK EMKM, adanya catatan transaksi berbasis akrual, adanya pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, dan adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai tanggapan responden terhadap tingkat pemahaman dan kesiapan dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah melakukan rekapitulasi jawaban-jawaban responden atas pernyataan yang ada dalam kuesioner berupa frekuensi dan skor, melakukan analisis atas jawaban mayoritas yang menjadi pilihan responden dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya. Untuk mengetahui hal tersebut, data dikumpulkan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada pemilik UMKM yang ada di Kota Mataram. Jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada seluruh responden dengan teknik sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Penyebaran kuesioner dilaksanakan dari tanggal 29

Juli sampai dengan 10 Agustus 2020. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner, maka diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan, jenis usaha, bentuk usaha, umur usaha, jumlah tenaga kerja dan rata-rata omset per tahun.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	56	56%
2	Perempuan	44	44%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 1, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang dan 44 orang berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian pelaku UMKM di Kota Mataram yang dijadikan sebagai sampel penelitian mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

Adapun karakteristik responden berdasarkan usia dapat ditampilkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	26-35 tahun	33	33%
2	36-45 tahun	24	24%
3	46-55 tahun	22	22%
4	diatas 55 tahun	21	21%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Dari data Tabel 2, usia responden paling banyak diantara 26-35 tahun yaitu 33 orang, sedangkan responden yang berusia 36-45 tahun sebanyak 24 orang. Responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 22 orang dan diatas 55 tahun sebanyak 21 orang. Dengan demikian responden mayoritas berada pada usia produktif.

Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah	Persentase
1	Belum kawin	15	15%
2	Kawin	85	85%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data pada Tabel 3, responden mayoritas berstatus kawin yaitu sebanyak 85 orang sedangkan responden yang memiliki status perkawinan belum kawin hanya sebanyak 15 orang.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	9	9%
2	SMP	9	9%
3	SMA	32	32%

4	Diploma	17	17%
5	Sarjana	33	33%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel 4, tingkat pendidikan responden mayoritas telah menamatkan Strata 1 atau sarjana sebanyak 33 orang, diploma 17 orang, SMA sebanyak 32 orang dan SD atau SMP masing-masing sebanyak 9 orang. Dengan demikian, pelaku UMKM di Kota Mataram telah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dalam menjalankan usaha.

Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Jasa	38	38%
2	Dagang	55	55%
3	Manufaktur/Industri	7	7%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 5, jenis usaha responden paling banyak (55 orang) adalah dagang, selanjutnya yang menekuni usaha jasa sebanyak 38 orang dan industri hanya 7 orang.

Karakteristik responden berdasarkan bentuk usaha dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Bentuk Usaha

No	Bentuk Usaha	Jumlah	Persentase
1	Perseorangan	95	95%
2	CV	3	3%
3	PT	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 6, responden pada umumnya memiliki bentuk usaha perseorangan yaitu sebanyak 95 orang, yang berbentuk CV hanya 3 orang dan PT hanya 2 orang.

Karakteristik responden berdasarkan umur usaha dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Usaha

No	Umur Usaha	Jumlah	Persentase
1	1-10 tahun	42	42%
2	11-20 tahun	38	38%
3	21-30 tahun	15	15%
4	31-40 tahun	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 7, umur usaha responden mayoritas (42 orang) diantara 1-10 tahun. Sedangkan yang memiliki umur usaha antara 11-20 tahun sebanyak 38 orang. Responden yang memiliki umur usaha 21-30 tahun sebanyak 15 orang dan yang memiliki umur usaha 31-40 tahun hanya 5 orang.

Karakteristik responden berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah	Persentase
1	Kurang dari 10 orang	99	99%
2	10-19 orang	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 8, jumlah tenaga kerja yang dimiliki responden mayoritas (99 orang) adalah kurang dari 10 orang, sedangkan yang memiliki tenaga kerja 10-19 orang hanya 1 orang responden.

Karakteristik responden berdasarkan rata-rata onset per tahun dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Omset Per Tahun

No	Omset Per Tahun	Jumlah	Persentase
1	≤ 300 juta	85	85%
2	diatas 300 juta – 2,5 milyar	13	13%
3	diatas 2,5 milyar	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 9, sebanyak 85 responden memiliki omset kurang dari atau sama dengan 300 juta rupiah, responden yang memiliki omset diatas 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah sebanyak 13 orang dan hanya 2 orang responden yang memiliki omset diatas 2,5 milyar rupiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan rekapitulasi jawaban-jawaban responden atas pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan memberikan skor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada pernyataan variabel tingkat pemahaman dan skor 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) pada pernyataan tingkat kesiapan. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase atas masing-masing pilihan jawaban.

Berikut disajikan jawaban responden terhadap tingkat pemahaman SAK EMKM yang meliputi pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan, dapat dilihat pada tabel 10, 11 dan 12 sebagai berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator Pengukuran

No.	Pernyataan	Frekuensi / Skor	Kriteria Jawaban					Jumlah	Rata-Rata	Kategori
			5	4	3	2	1			
1	Menurut SAK EMKM, dasar pengukuran unsur laporan keuangan adalah biaya historis	Frekuensi	14	30	34	14	8	100	3,28	Cukup Paham
		Skor	70	120	102	28	8	328		

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 10, jawaban responden terhadap pernyataan pengukuran sebagai salah satu indikator tingkat pemahaman SAK EMKM yaitu sebanyak 34 responden memilih jawaban 3 (cukup paham), sedangkan yang memilih 4 (paham) dan 5 (sangat paham) masing-masing sebanyak 30 dan 14 orang responden. Responden yang memilih jawaban 2 (tidak paham) dan 1 (sangat tidak paham) masing-masing sebanyak 14 dan 8 orang responden. Dengan demikian dari 100 responden memiliki total skor sebanyak 328 dan rata-rata 3,28, sehingga dapat dikategorikan cukup paham.

Tabel 11. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator Asumsi Dasar

No.	Pernyataan	Frekuensi / Skor	Kriteria Jawaban					Jumlah	Rata-Rata	Kategori
			5	4	3	2	1			

2	Menurut SAK EMKM, dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi dasar akrual	Frekuensi	17	25	34	16	8	100	3,27	Cukup Paham
		Skor	85	100	102	32	8	327		
3	Menurut SAK EMKM, dalam menyusun laporan keuangan harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha	Frekuensi	15	32	29	18	6	100	3,32	Cukup Paham
		Skor	75	128	87	36	6	332		
4	Pada saat menyusun laporan keuangan, pelaku UMKM menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa depan	Frekuensi	24	29	26	15	6	100	3,50	Paham
		Skor	120	116	78	30	6	350		
Jumlah Frekuensi			56	86	89	49	20	300	3,36	Cukup Paham
Skor			280	344	267	98	20	1009		

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 11, jawaban responden terhadap pernyataan asumsi dasar yang terdiri dari tiga pernyataan sebagai salah satu indikator tingkat pemahaman SAK EMKM yaitu pilihan jawaban 3 (cukup paham) memiliki frekuensi paling tinggi yaitu sebanyak 89, sedangkan pilihan jawaban 4 (paham) dan 5 (sangat paham) masing-masing sebanyak 86 dan 56. Untuk pilihan jawaban 2 (tidak paham) dan 1 (sangat tidak paham) masing-masing sebanyak 49 dan 20 kali. Dengan demikian dari 100 responden memiliki jumlah frekuensi jawaban sebanyak 300 dengan total skor sebanyak 1.009 dan rata-rata 3,36, sehingga dapat dikategorikan cukup paham.

Tabel 12. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Indikator Penyajian Laporan Keuangan

No.	Pernyataan	Frekuensi / Skor	Kriteria Jawaban					Jumlah	Rata-Rata	Kategori
			5	4	3	2	1			
5	Menurut SAK EMKM, laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan	Frekuensi	22	27	28	14	9	100	3,39	Cukup Paham
		Skor	110	108	84	28	9	339		

6	Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode	Frekuensi	22	33	24	13	8	100	3,48	Paham
		Skor	110	132	72	26	8	348		
7	Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak	Frekuensi	25	34	20	11	10	100	3,53	Paham
		Skor	125	136	60	22	10	353		
8	Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan	Frekuensi	16	18	43	14	9	100	3,18	Cukup Paham
		Skor	80	72	129	28	9	318		
Jumlah Frekuensi			85	112	115	52	36	400	3,40	Cukup Paham
Skor			425	448	345	104	36	1358		

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 12, jawaban responden terhadap pernyataan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari empat pernyataan sebagai salah satu indikator tingkat pemahaman SAK EMKM yaitu pilihan jawaban 3 (cukup paham) memiliki frekuensi paling tinggi yaitu sebanyak 115, sedangkan pilihan jawaban 4 (paham) dan 5 (sangat paham) masing-masing sebanyak 112 dan 85. Untuk pilihan jawaban 2 (tidak paham) dan 1 (sangat tidak paham) masing-masing sebanyak 52 dan 36 kali. Dengan demikian dari 100 responden memiliki jumlah frekuensi jawaban sebanyak 400 dengan total skor sebanyak 1.358 dan rata-rata 3,40, sehingga dapat dikategorikan cukup paham.

Jawaban responden terhadap tingkat kesiapan implementasi SAK EMKM yang meliputi pentingnya SAK EMKM, adanya catatan transaksi berbasis akrual, adanya pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, dan adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, dapat dilihat pada tabel 13. Berdasarkan Tabel 13, jawaban responden terhadap pernyataan pentingnya SAK EMKM yaitu pilihan jawaban 2 (Ya) memiliki frekuensi paling tinggi yaitu sebanyak 63, sedangkan pilihan jawaban 1 (Tidak) sebanyak 37. Jawaban responden terhadap pernyataan adanya catatan transaksi berbasis akrual yaitu pilihan jawaban 1 (Tidak) memiliki frekuensi paling tinggi yaitu sebanyak 53, sedangkan pilihan jawaban 2 (Ya) sebanyak 47. Jawaban responden terhadap pernyataan adanya pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi yaitu pilihan jawaban 1 (Tidak) memiliki frekuensi paling tinggi yaitu sebanyak 52, sedangkan pilihan jawaban 2 (Ya) sebanyak 48. Sedangkan jawaban responden terhadap pernyataan adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang akuntansi yaitu pilihan jawaban 1 (Tidak) memiliki frekuensi paling tinggi yaitu sebanyak 73, sedangkan pilihan jawaban 2 (Ya) sebanyak 27. Dengan demikian dari 100 responden memiliki jumlah frekuensi jawaban sebanyak 400 dengan total skor sebanyak 585 dan rata-rata 1,46, sehingga dapat dikategorikan tidak siap.

Tabel 13. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Variabel Tingkat Kesiapan

No.	Pernyataan	Frekuensi / Skor	Kriteria Jawaban		Jumlah	Rata-Rata	Kategori
			2	1			
1	Apakah anda mengetahui bahwa dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif per 1 Januari 2018	Frekuensi	63	37	100	1,63	Siap
		Skor	126	37	163		
2	Apakah anda telah menerapkan pencatatan keuangan dengan menggunakan dasar akrual?	Frekuensi	47	53	100	1,47	Tidak Siap
		Skor	94	53	147		
3	Apakah anda telah melakukan pemisahan semua transaksi yang berkaitan dengan usaha anda dengan transaksi pribadi pemilik usaha?	Frekuensi	48	52	100	1,48	Tidak Siap
		Skor	96	52	148		
4	Apakah anda sudah memiliki sumber daya manusia (bagian accounting/konsultan) yang mampu menyusun laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan?	Frekuensi	27	73	100	1,27	Tidak Siap
		Skor	54	73	127		
Jumlah Frekuensi			185	215	400	1,46	Tidak Siap
Skor			370	215	585		

Sumber: Data diolah (2020)

Pembahasan

Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM di Kota Mataram dalam Mengimplementasikan SAK EMKM dalam Pelaporan Keuangan

Berdasarkan analisis data, rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan tingkat pemahaman SAK EMKM yaitu untuk indikator pengukuran dengan rata-rata 3,28, indikator asumsi dasar memiliki rata-rata 3,36 dan indikator penyajian laporan keuangan dengan rata-rata 3,40. Dengan demikian nilai rata-rata untuk variabel tingkat pemahaman SAK EMKM adalah sebesar 3,37 atau dalam kategori cukup paham.

Pelaku UMKM di Kota Mataram memiliki pemahaman yang cukup terhadap SAK EMKM baik dalam hal pengukuran, asumsi dasar dan penyajian laporan keuangan. Pelaku UMKM cukup paham bahwa dasar pengukuran unsur laporan keuangan adalah biaya historis yaitu ukuran nilai yang digunakan dalam akuntansi di mana harga suatu aset pada neraca didasarkan pada biaya aslinya ketika diperoleh oleh perusahaan. DSAK IAI (2016) menjelaskan bahwa biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan sedangkan

biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Pelaku UMKM cukup paham bahwa dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi dasar akrual, harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha (konsep entitas bisnis), dan menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa depan (konsep kelangsungan usaha). Menurut DSAK IAI (2016) bahwa entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual, menganut konsep kelangsungan usaha dan entitas bisnis. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi. Entitas bisnis baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya.

Pelaku UMKM cukup paham bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut DSAK IAI (2016) laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode, laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak, dan catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan.

Tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Mataram ini tergolong cukup dapat disebabkan karena mayoritas tingkat pendidikan pelaku UMKM telah memadai yaitu sebanyak 33 persen telah menamatkan S1 dan S2. Dengan tingkat pendidikan yang memadai ini, paling tidak pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan usahanya dan mampu mengakses informasi untuk mengembangkan usaha termasuk tentang SAK EMKM. Pelaku UMKM di Kota Mataram juga telah banyak yang memiliki usaha lebih dari 10 tahun, artinya telah memiliki pengalaman dalam dunia usaha yang ditekuni.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Salmiah dkk (2018) bahwa pemahaman terhadap SAK EMKM pada Pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru hanya pada tingkat cukup. Pemahaman pada tingkat cukup ini, terutama pemahaman tentang konsep asumsi dasar yaitu konsep akrual basis dan konsep entitas bisnis serta konsep penyajian laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Dewi & Sari (2019) bahwa pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng hampir seluruhnya mengetahui tentang SAK EMKM yang diterbitkan pada 1 Januari 2018.

Kesiapan Pelaku UMKM di Kota Mataram dalam Mengimplementasikan SAK EMKM dalam Pelaporan Keuangan

Berdasarkan analisis data, rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan tingkat kesiapan terhadap implementasi SAK EMKM yaitu 1,46 atau dalam kategori tidak siap. Kondisi tidak siap ini terutama pada tidak dimilikinya catatan transaksi berbasis akrual, tidak adanya pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, dan tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Sedangkan pentingnya SAK EMKM dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan telah diketahui oleh para pelaku UMKM di Kota Mataram.

Pelaku UMKM di Kota Mataram umumnya memiliki bentuk usaha perseorangan dan mayoritas usaha di bidang dagang. Bentuk usaha perseorangan tentunya masih sulit dilakukan pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Sebagaimana telah diatur dalam SAK EMKM bahwa entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi

yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut maupun dari transaksi entitas lainnya (DSAK IAI, 2016).

Pelaku UMKM di Kota Mataram memang telah memiliki tingkat pendidikan yang memadai, namun belum memiliki sumber daya manusia (bagian accounting/konsultan) yang mampu menyusun laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. DSAK IAI (2016) telah menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi kreditur dan investor. Tidak dimilikinya sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan disebabkan karena belum adanya tuntutan dari para pengguna seperti kreditur. Pada umumnya pelaku UMKM di Kota Mataram yang membutuhkan bantuan permodalan dari perbankan lebih memanfaatkan dana KUR, yang mana dalam pengajuan dana tersebut tidak mempersyaratkan adanya laporan keuangan. Seperti halnya BRI mengeluarkan KUR Mikro dengan syarat individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak; usaha/bisnis yang berjalan haruslah telah aktif minimal enam bulan; tidak memiliki tanggungan kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB dan Kartu Kredit; dan wajib memenuhi persyaratan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Ijin Usaha (SIU) (<https://kur.bri.co.id/>).

Tingkat kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangan masuk dalam kategori tidak siap. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lestari (2019) bahwa UMKM pengrajin mebel di Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno belum siap menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangan dikarenakan belum mengetahui dan memahami tentang SAK EMKM, belum pernah membuat laporan keuangan yang berpedoman pada SAK, dan tidak ada pegawai khusus untuk menyelenggarakan pembukuan. Sholikin & Setiawan (2018) juga menyimpulkan bahwa Rumah Mode Een Productions dan Kanaya Konveksi tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM karena tidak mengetahui adanya SAK EMKM, pencatatan keuangan masih menggunakan basis kas dan belum memiliki sumber daya manusia yang memahami tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK. Hasil penelitian Qimiyatussa'adah dkk (2018) juga menunjukkan bahwa 90% responden belum mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Putra (2018) juga menemukan mayoritas (80,4 persen) UMKM di Kota Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya berada pada kategori cukup paham. Artinya pelaku UMKM di Kota Mataram memiliki pemahaman yang cukup dalam hal pengukuran, asumsi dasar dan penyajian laporan keuangan. (2) Tingkat kesiapan pelaku UMKM di Kota Mataram dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya berada pada kategori tidak siap. Pelaku UMKM di Kota Mataram tidak memiliki catatan transaksi berbasis akrual, tidak ada pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, dan tidak memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi.

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah: (1) Bagi pelaku UMKM sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang akuntansi dan SAK EMKM dengan mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun para akademisi. (2) Bagi pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Koperasi UMKM Kota Mataram bekerjasama dengan IAI wilayah NTB untuk memberikan sosialisasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM agar pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan dan merasakan manfaat dari adanya informasi akuntansi tersebut. (3) Bagi STIE AMM Mataram sebaiknya melakukan pendampingan kepada UMKM yang ada di Kota Mataram bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Mataram, sebagai bentuk

pengabdian kepada masyarakat. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melihat hubungan pemahaman dan kesiapan terhadap potensi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Luh Gede Kusuma., & Luh Gede Jayanti Mekar Sari. (2019). Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM (Studi Kasus pada Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, Hal: 141-160.
- DSAK IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: IAI.
<https://www.kataknews.com/2020/07/ketua-icsb-ntb-peran-umkm-strategis-di.html>
- Lestari, Evi Puji. (2019). Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, Vol. 2, No. 1, Hal: 24-33.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2018). *Laporan Tahunan Bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun 2018*.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Putra, Yananto Mihadi. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 11, No. 2, Hal: 201-217.
- Qimyatussa'adah., Sasmito W. Nugroho., & Halleina R. P. Hartono. (2018). Pengetahuan Dan Pemahaman Pelaku Umkm Atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal MONEX*, Vol. 9 No. 2, Hal: 146-151.
- Saerang, D. P. E., Tulung, J. E., & Ogi, I. W. J. (2018). The influence of executives' characteristics on bank performance: The case of emerging market. *Journal of Governance & Regulation*, 7(4), 13-18.
- Salmiah, Neneng., Satria Tri Nanda., & Intan Adino. (2018). Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap Sak Emkm : Survey Pada Umkm Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 2 No. 2, Hal: 194-204.
- Sholikin, Ahmad & Ade Setiawan. (2018). Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1 No. 2, Hal: 35-50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Tulung, J. E., Saerang, I. S., & Pandia, S. (2018). The influence of corporate governance on the intellectual capital disclosure: a study on Indonesian private banks. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 61-72.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. *Corporate Ownership & Control*, 15(2-1), 201-208.

- Tulung, J.E. (2017). Resource Availability and Firm's International Strategy as Key Determinants Of Entry Mode Choice. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 15(1), 160-168.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2015). The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), 155-166.
- Tulung, J. E., Nelwan, O. S., & Lengkong, V. P. (2012). Top Management Team and Company Performance in Big Countries vs Small Countries. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, 15(1), 59-70.

